



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Sabuk Alu.No.2A Wonosobo

W O N O S O B O

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor: 900 / /2022

Laporan Keuangan SKPD Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Wonosobo TA 2021 yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional (LO);
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK);

sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Wonosobo, 23 Mei 2022

Kepala Dinas Komunikasi Dan
Informatika,

FAHMI HIDAYAT.S.IP.M.P.P

NIP. 19631026 199103 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN	2021	2020
EKUITAS AWAL	6.956.490.224,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.033.501.018,00)	(5.691.213.015,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Ekuitas	(358.652.316,00)	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	6.486.830.373,00	0,00
EKUITAS AKHIR	6.051.167.263,00	(5.691.213.015,00)

Wonosobo, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS

FAHMI HIDAYAT .S.IP.,M.P.P

NIP. 197108251999031006



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2021 DAN 2020

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	545.547.520,00	335.788.480,00	209.759.040,00	62,47
7 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	545.547.520,00	335.788.480,00	209.759.040,00	62,47
7 . 1 . 1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 2	Retribusi Daerah-LO	545.547.520,00	335.788.480,00	209.759.040,00	62,47
7 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 1 . 4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	7.579.048.538,00	6.081.001.495,00	1.498.047.043,00	24,63
8 . 1 . 1	Beban Pegawai	2.560.242.620,00	2.258.534.745,00	301.707.875,00	13,36
8 . 1 . 2	Beban Barang dan Jasa	3.295.901.287,00	2.342.473.753,00	953.427.534,00	40,70
8 . 1 . 3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 1 . 7	Beban Penyisihan Piutang	235.153.290,00	0,00	235.153.290,00	0,00
8 . 1 . 8	Beban Lain-lain	0,00	890.217,00	(890.217,00)	(100,00)
8 . 2 . 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.361.619.964,00	1.365.377.789,00	(3.757.825,00)	(0,28)
8 . 2 . 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	70.160.501,00	79.798.319,00	(9.637.818,00)	(12,08)
8 . 2 . 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
8 . 2 . 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55.090.876,00	33.046.672,00	22.044.204,00	66,71

Urusan Pemerintahan : 2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 2 . 10 Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2021	SALDO 2020	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(7.033.501.018,00)	(5.745.213.015,00)	(1.288.288.003,00)	22,42
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(7.033.501.018,00)	(5.745.213.015,00)	(1.288.288.003,00)	22,42
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	(54.000.000,00)	54.000.000,00	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	54.000.000,00	(54.000.000,00)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(7.033.501.018,00)	(5.691.213.015,00)	(1.342.288.003,00)	23,59

Wonosobo, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS

RETNO EKO SYAFARIATI N, S.Sos, MM

NIP. 197303161992032004



NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Per 31 December 2021 dan 2020

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN	2021	2020
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	297.229.550,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	(235.153.290,00)	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	1.092.500,00	1.007.893,00
JUMLAH ASET LANCAR	63.168.760,00	1.007.893,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	134.400.000,00	385.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.788.324.209,00	5.944.136.981,00
Gedung dan Bangunan	3.553.176.950,00	3.983.849.750,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	17.600.000,00	17.600.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(5.186.869.454,00)	(3.902.389.735,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.306.631.705,00	6.428.196.996,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	742.816.260,00	520.326.260,00
Aset Lain-lain	74.990.596,00	81.639.758,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(127.657.139,00)	(72.566.263,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	690.149.717,00	529.399.755,00

Urusan Pemerintahan : 2 . 10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika
Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Sub Unit Organisasi : 2 . 10 . 01 . 01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

URAIAN	2021	2020
JUMLAH ASET	6.059.950.182,00	6.958.604.644,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	8.782.919,00	2.114.420,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	8.782.919,00	2.114.420,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	8.782.919,00	2.114.420,00
EKUITAS		
EKUITAS	6.051.167.263,00	6.956.490.224,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	6.059.950.182,00	6.958.604.644,00

Wonosobo, 31 Desember 2021

KEPALA DINAS

FAHMI HIDAYAT, S.IP., M.P.P

NIP. 197108251999031006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan target pencapaian realisasi anggaran berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

2. Tujuan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan transparansi serta akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- b. Laporan Operasional (LO);
- c. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- d. Neraca;
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Sebagaimana halnya dengan proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD, maka dalam penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten

Wonosobo Tahun Anggaran 2021 ini tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950, Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 14. PP Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119));
 15. PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 16. PP Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 18. PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 19. PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 20. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 21. PP Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 22. PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
28. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5533);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan, Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
30. Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1997;
32. Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
33. Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
34. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
35. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4);
37. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15);
38. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
39. Peraturan Bupati (Perbup) Wonosobo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Wonosobo;

40. Perbup Wonosobo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
41. Perbup Wonosobo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
42. Perbup Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Wonosobo Nomor 77 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo);
43. Perbup Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Perbup Wonosobo Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan APBD Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan.
- 1.2. Landasan Hukum.
- 1.3. Sistematika Penulisan.

Bab. II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1. Ikhtisar Realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab. III Penjelasan pos – pos laporan keuangan

- 3.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 3.1.1. Pendapatan LRA
 - 3.1.2. Belanja LRA
- 3.2. Laporan Operasional (LO)
 - 3.2.1. Pendapatan LO
 - 3.2.2. Beban LO
- 3.3. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 3.3.1. Perubahan Ekuitas
- 3.4. Neraca
 - 3.4.1. Aset
 - 3.4.2. Kewajiban
 - 3.4.3. Ekuitas

Bab. IV Penjelasan atau informasi-informasi non keuangan

Bab. V Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Realisasi Pendapatan

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Rencana Pendapatan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp294.000.000,00 dapat direalisasi sebesar Rp497.895.760,00 atau 169,35% yang berarti lebih dari anggaran sebesar Rp203.895.760,00

Rincian realisasi pendapatan daerah sebagai berikut :

URAIAN	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
			Rp.	%
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Retribusi pengawasan dan Pengendalian	272.000.000,00	408.145.470,00	136.145.470,00	150,05
Retribusi Penyewaan Bangunan	22.000.000,00	89.750.290,00	67.750.290,00	40.96
Jumlah PAD	294.000.000,00	497.895.760,00	203.895.760,00	169,35

JUMLAH PENDAPATAN	294.000.000,00	497.895.760,00	203.895.760,00	169,35
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------------

B. Realisasi Belanja Daerah

Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.566.902.895,00 dapat direalisasi Rp6.984.726.133,00 atau 92,31% terdiri dari Belanja Operasional direncanakan sebesar Rp5.967.414.407,00 dapat direalisasi sebesar Rp5.454.021.683,00 atau 91,40%. Dan Belanja Modal di rencanakan Rp1.599.488.488,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.530.704.450,00 atau 95,70 %

Menurut Kelompok Belanja	ANGGARAN	REALISASI	BERLEBIH/ BERKURANG	%
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	2.769.734.695,00	2.560.572.510,00	(21.887.920,00)	92,45
Belanja Gaji Pokok ASN	1.145.228.200,00	1.123.340.280,00	(21.8887.920,00)	98,09
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	135.075.191,00	125.364.183,00	(9.711.088,00)	92,81
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	121.750.000,00	114.499.00,00	(7.260.000,000)	94,04
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	28.690.600,00	26.055.000,00	(2.635.600,00)	90,81
Belanja Tunjangan Beras ASN	76.441.362,00	71.623.380,00	(4.817.982,00)	93,70
Belanja Khusus PPh/Tunjangan Khusus ASN	26.500.000,00	16.387.742,00	(10.112.258,00)	61,84
Belanja Pembulatan Gaji	250.000,00	15.220,00	(234.780,00)	06,08
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	489.279.876,00	475.089.168,00	(14.190.708,00)	97,09

Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	733.919.736,00	595.607.537,00	(138.312.199,00)	81,15
Belanja Barang dan Jasa	3.197.679.442,00	2.893.449.173,00	(304.230.269,00)	90,48
Belanja Barang Pakai Habis	474.057.860,00	351.991.167,00	(122.066.693)	74,25
Belanja Jasa Barang Tak pakai habis	483.000,00	483.00,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	2.108.886.884,00	2.021.711.103,00	(87.175.741,00)	95,86
Belanja Iuran/Asuransi	20.650.000,00	18.551.110,00	(2.098.890,00)	89,83
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	273.400.000,00	268.785.000,00	(4.615.00,00)	98,31
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan, Teknis Serta, Pendidikan dan Pelatihan	24.662.000,00	15.900.000,00	(8.762.000,00)	98,31
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.738.856,00	69.983.650,00	(36.755.206,00)	98,31
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.184.607,00	23.382.500,00	(5.802.107,00)	80,12
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.016.275,00	119.061.643,00	(36.954632,00)	76,31
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00.	0,00
Belanja Modal				
Belanja Peralatan dan Mesin	1.283.135.998,00	1.235.765.450,00	(47.370.538,00)	96,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	72.449.000,00	(2.551.000,00)	96,59
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	241.352.500,00	222.490.000,00	(18.862.500,00)	92,18
SURPLUS/DEFISIT	(7.272.902.895,00)	(6.468.830.373,00)	786.072.522,00	89,19

SISA LEBIH /KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	(7.272.902.895,00)	(6.468.830.373,00)	786.072.522,00	89,19
--	---------------------------	---------------------------	-----------------------	--------------

2.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

1. Hambatan Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Pendapatan tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan dikarenakan terdapatnya sumber pendapatan baru selain pendapatan dari LPPL radio Pesona FM yaitu ,pendapatan dari pengawasan menara telekomunikasi ,namun dari pencapaian realisasi pendapatan yang didapat belum maksimal dikarenakan tagihan yang sudah diberikan kepada pihak ketiga pemilik menara tidak sepenuhnya dibayarkan oleh pemilik menara atau pembayaran nya yang tidak sesuai dengan data tagihan yang dikirim.

2. Hambatan Pencapaian Target Belanja.

Realisasi belanja tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sudah melebihi sembilan puluh persen namun pencapaian ini belum maksimal dikarenakan pada tahun 2021 adanya refokusing anggaran untuk covid-19 sehingga ada beberapa kegiatan yang tertunda dan menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal.

Belanja Kelurahan Kramatan mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan merupakan kewajiban Kelurahan Kramatan dalam satu tahun anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kelurahan Kramatan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1. Pendapatan-LRA

Pendapatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Wonosobo meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan lain-lain Pendapatan yang sah, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2021 serta realisasi TA 2021, sebagai berikut :

Tabel V.1

Posisi Pendapatan-LRA Dinas Komunikasi dan Informatika

<i>Pendapatan-LRA</i>	TA 2021		TA 2020
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah-LRA	497.895.760,00	294.000.000,00	313.788.480,00
Pendapatan Transfer-LRA	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA	-	-	-
Jumlah Pendapatan Daerah	497.895.760,00	294.000.000,00	313.788.480,00

Realisasi Pendapatan-LRA SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 sebesar Rp497.895.760,00 atau 169,35% dari anggaran sebesar Rp294.000.000,00 dan mengalami kenaikan 58,67% dari realisasi TA 2020 sebesar Rp313.788.480,00 Realisasi masing-masing pendapatan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Akun ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk periode Tahun Anggaran 2021 dan 2020, dengan rincian pos dan jumlah PAD sebagai berikut :

Tabel V.2

Pendapatan Asli Daerah-LRA Pemerintah Kabupaten Wonosobo

<i>Pendapatan Asli Daerah-LRA</i>	TA 2021		TA 2020
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	0,00	0,00	305.188.480,00
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	408.145.470,00	272.000.000,00	0,00
Retribusi Pemakasian Kekayaan Daerah	0,00	0,00	30.600.000,00
Retribusi Pengawasan Bangunan	89.750.290,00	22.000.000,00	0,00
JUMLAH PAD	497.895.760,00	294.000.000,00	335.788.480,00

Realisasi Pendapatan SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 sebesar Rp497.895.760,00 atau 169,35% dari anggarannya sebesar Rp294.000.000,00 dan mengalami kenaikan 58,67% dari Realisasi TA 2020 sebesar Rp313.788.480,00 Realisasi Ini berasal dari pendapatan retribusi pengawasan dan pengendalian menara sebesar Rp408.145.470,00 dan retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan bangunan sebesar Rp89.750.290,00

3.1.2. BELANJA

Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Hibah

Anggaran dan realisasi belanja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 serta realisasi TA 2020 sebagai berikut :

Belanja Daerah	TA 2021		TA 2020
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Operasi	5.454.021.683,00	5.597.414.407,00	4.581.042.232,00
(ii) Belanja Modal	1.530.704.450,00	1.599.488.488,00	1.420.715.700,00
(iii) Belanja Hibah	-	-	
(iv) dst			
Jumlah Belanja Daerah			
	6.984.726.133,00	7.566.902.895,00	6.001.757.932,00

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2021 sebesar Rp6.984.726.133,00 atau 92,31% dari Anggaran sebesar Rp7.566.902.895,00 dan mengalami kenaikan 16,38 % dari realisasi TA 2020 sebesar Rp6.001.757.932,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, dengan realisasi TA 2021 dan 2020 sebagai berikut :

Belanja Operasi	TA 2021		TA 2020
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
(i) Belanja Pegawai	2.560.572.510,00	2.520.308.254,00	2.560.572.510,00
(ii) Belanja Barang dan Jasa	2.893.449.173,00	3.197.679.442,00	2.284.961.487,00
(iii) Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi			
	5.454.021.683,00	5.967.414.407,00	4.581.042.232,00

Realisasi Belanja Operasi TA 2021 sebesar Rp5.454.021.683,00 atau 92,31% dari anggaran Rp5.967.414.407,00 dan mengalami kenaikan sebesar 52,47% dari realisasi TA 2020 Rp4.581.042.232,00

a. Belanja Pegawai

Anggaran & Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Pegawai</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.546.535.353,00	1.489.875.805,00
<i>Belanja Gaji Pokok ASN</i>	<i>1.145.228.200,00</i>	<i>1.123.340.280,00</i>
Belanja Gaji Pokok PNS	1.145.228.200,00	1.123.340.280,00
Belanja Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00
<i>Belanja Tunjangan Keluarga ASN</i>	<i>135.075.191,00</i>	<i>125.364.183,00</i>
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	135.075.191,00	125.364.183,00
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	0,00	0,00
<i>Belanja Tunjangan Jabatan ASN</i>	<i>121.750.000,00</i>	<i>114.490.000,00</i>
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	121.750.000,00	114.490.000,00
<i>Belanja Tunjangan Fungsional ASN</i>	<i>12.600.000,00</i>	<i>12.600.000,00</i>
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	12.600.000,00	12.600.000,00
<i>Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</i>	<i>28.690.600,00</i>	<i>26.055.000,00</i>
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	28.690.600,00	26.055.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	0,00	0,00
<i>Belanja Tunjangan Beras ASN</i>	<i>76.441.362,00</i>	<i>71.623.380,00</i>
Belanja Tunjangan Beras PNS	76.441.362,00	71.623.380,00
Belanja Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00
<i>Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</i>	<i>26.500.000,00</i>	<i>16.387.742,00</i>
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	26.500.000,00	16.387.742,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00	0,00
<i>Belanja Pembulatan Gaji ASN</i>	<i>250.000,00</i>	<i>15.220,00</i>
Belanja Pembulatan Gaji PNS	250.000,00	15.220,00

Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	0,00	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00	0,00
Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.233.199.612,00	1.070.696.705,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	489.279.876,00	475.089.168,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	489.279.876,00	475.089.168,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	733.919.736,00	595.607.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	733.919.736,00	595.607.537,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	0,00	0,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0,00	0,00

Belanja TPG PNSD	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	0,00	0,00
Belanja TKG PNSD	0,00	0,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	0,00	0,00
Belanja Tamsil Guru PNSD	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00
 dst		
JUMLAH	2.769.734.965,00	2.560.572.510,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar Rp2.560.572.510,00 atau 92,45% dari anggaran Rp2.769.734.965,00 dan mengalami kenaikan sebesar 22,06% dari realisasi TA 2020 Rp2.269.080.745,00 dengan Rincian sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN TA 2021 sebesar Rp1.489.875.805,00 atau 96,34% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp1.546.535.353,00
- Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2021 sebesar Rp1.070.696.705,00 atau 86,82% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp1.233.199.612,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	474.540.860,00	352.474.167,00
<i>Belanja Barang Pakai Habis</i>	<i>474.057.860,00</i>	<i>351.991.167,00</i>
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	474.047.860,00	351.991.167,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	0,00	0,00

Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.684.250,00	32.017.003,00
Belanja Bahan-Bahan Baku	990.150,00	485,460,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	0,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	0,00	0,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.914.000,00	1.914.000,00
Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	0,00	0,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	0,00	0,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	16.709.500,00	6.056.750,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	48.748.000,00	27.545.736,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	26.321.500,00	17.457.050,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	87.260.500,00	71.306.550,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	6.000.000,00	1.850.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	9.467.000,00	6.480.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	17.3348.564,00	15.656.688,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	13.274.000,00	6.836.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	0,00	0,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor - Alat Bahan Kantor Kegiatan Lainnya	51.695.000,00	50.131.400,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	89.222.000,00	84.627.500,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	0,00
Belanja Barang Tak Habis Pakai	483.000,00	483.000,00
Belanja Pipa-Pipa Lainnya	483.000,00	483.000,00
Belanja Jasa	2.431.198.844,00	2.328.547.213,00
Belanja Jasa Kantor	2.108.886.844,00	2.021.711.103,00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	22.600.000,00	22.600.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00

Belanja Jasa Tenaga Administrasi	713.75.200,00	688.185.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	88.920.000,00	86.577.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	0,00	0,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	22.230.000,00	16.308.000,00
Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	99.982.810,00	86.105.000,00
Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	5.600.000,00	5.600.00,00
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	103.000.000,00	102.000.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	313.000.000,00	311.550.000,00
Belanja Tagihan Telepon	3.000.000,00	655.945,00
Belanja Tagihan Air	3.000.000,00	1.469.945,00
Belanja Tagihan Listrik	48.000.000,00	44.865.479,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	12.870.000,00	12.840.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	636.868.000,00	609.883.900,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.600.834,00	11.590.834,00
Belanja Lembur	24.540.000,00	21.480.000,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.650.000,00	18.551.110,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.200.000,00	8.278.800,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	11.450.000,00	10.272.310,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Belanja Sewa Mebel	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	0,00	0,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	0,00	0,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	3.600.000,00
Belanja Sewa Hotel	3.600.000,00	3.600.000,00
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Belanja Sewa Alat Musik	0,00	0,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	273.400.000,00	268.785.000,00
Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang – Telematika	273.400.000,00	268.785.000,00

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi,		
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	24.662.000,00	15.900.000,00
Belanja Pemeliharaan	135.923.463,00	93.366.150,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.738.856,00	69.983.650,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	7.190.000,00	6.637.150,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	13.451.250,00	5.364.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.350.000,00	19.152.500,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	1.220.000,00	925.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	11.998.116,00	11.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	27.180.000,00	18.235.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.349.440,00	7.720.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	29.184.607,00	23.382.500,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	29.184.607,00	23.382.500,00
Belana Perjalanan Dinas	156.016.275,00	119.061.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	156.016.275,00	119.061.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	145.516.275,00	108.561.643,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.500.000,00	10.500.000,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	0,00
Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	0,00
Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	0,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00

JUMLAH	3.197.679.442,00	2.983.449.173,00
--------	------------------	------------------

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebesar Rp2.893.449.173,00 atau 90,49% dari anggaran Rp3.197.674.442,00 dan mengalami kenaikan sebesar 27,52% dari realisasi TA 2020 Rp2.269.080.745,00 dengan Rincian sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Barang sebesar Rp352.474.167,00,00 atau 74,28% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp474.540.860,00
- Realisasi Belanja Jasa TA 2021 sebesar Rp2.382.547.213,00 atau 93,31% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp2.431.198.844,00

c. Belanja Hibah

Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Hibah</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
<i>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</i>	0,00	0,00
<i>Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</i>	0,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
<i>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</i>	0,00	0,00

Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00
<i>Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan</i>	0,00	0,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00
Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2021 sebagai berikut :

<i>Belanja Bantuan Sosial</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	0,00	0,00
JUMLAH	0,00	0,00

2. Belanja Modal

Belanja Modal meliputi Belanja Modal, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap lainnya dan Aset Lainnya dengan realisasi TA 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Belanja Modal	2021		2020
	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp.)
a. Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00
b. Belanja Peralatan dan Mesin	1.235.765.450,00	1.283.135.988,00	1.420.715.700,00

a. Belanja Gedung dan Bangunan	72.449.000,00	75.000.000,00	0,00
b. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
c. Belanja aset tetap Lainnya	222.4990.000,00	241.325.500,00	0,00
Jumlah Belanja Modal	1.530.704.450,00	1.599.488.488,00	1.420.715.700,00

Ralisasi Belanja Modal pada pos belanja modal TA 2021 Sebesar Rp1.530.704.450,00 atau mencapai 95,70% dari anggaran Rp1.599.488.488,00 Bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 naik 07,74% atau sebesar Rp1.420.715.700,00

a. Belanja Tanah

Tidak Terdapat Realsisasi Belanja Modal Tanah pada TA.2021 maupun 2020 atau dapat dikatakan Nihil.

b. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebagai berikut

:

<i>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.283.135.988,00	1.235.765.450,00
<i>Belanja Modal Alat Kantor</i>	<i>41.800.000,00</i>	<i>37.646.000,00</i>
Belanja Modal Alat Penyimpanan	17.200.000,00	16.255.000,00
Belanja Modal Alat Kantor	24.600.000,00	21.421.000,00
<i>Belanja Modal Alat Rumah Tangga</i>	<i>193.774.400,00</i>	<i>182.722.250,00</i>
Belanja Modal Mabel	123.400.000,00	122.615.900,00
Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	63,574,400,00	53.726.350,00
Belanja Alat Pemadam Kebakaran	6.800.000,00	6.380.000,00
<i>Belanja Modal Alat Studio</i>	<i>30.000.000,00</i>	<i>29.249.000,00</i>
Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Studio	30.000.000,00	29.249.000,00
<i>Belanja Modal Peralatan Pemancar</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Modal Peralatan Pemancar VHF/FM	0,00	0,00
<i>Belanja Modal Komputer Unit</i>	<i>194.375.000,00</i>	<i>192.249.400,00</i>
Belanja Modal Komputer Jaringan	128.000.000,00	127.704.000,00
Belanja Modal Personal Computer	0,00	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	65.575.000,00	65.545.400,00
<i>Belanja Modal Peralatan Komputer</i>	<i>823.186.588,00</i>	<i>793.989.800,00</i>
Belanja Modal Peralatan Mainframe	198.188.464,00	193.670.000,00
Belanja Modala Peralatan Jaringan	624.998.124,00	600.228.800,00
JUMLAH	1.283.135.988,00	1.235.765.450,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 sebesar Rp1.235.765.450,00 atau 96,31% dari anggaran Rp1.283.135.988,00 dan mengalami kenaikan sebesar 12,99 dari realisasi TA 2020 Rp1.420.175.700,00 dengan Rincian sebagai berikut :

- Realisasi Belanja Modal Alat Kantor sebesar Rp37.646.000,00 atau 90,06% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp41.800.000,00
- Realisasi Belanja Modal Alat Rumah Tangga (Home Use) TA 2021 sebesar Rp182,722.250,00 atau 94,30% dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp193.774.400,00,00

- Realisasi Belanja Modal Alat Studio TA 2021 sebesar Rp29.249.000,00 atau 97,50% dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp30.000.000,00
- Realisasi Belanja Modal Komputer Unit TA 2021 sebesar Rp192.249.400,00 atau 98,91 dari anggaran yang di tentukan sebesar Rp194.375.000,00
- Realisasi Belanja Modal Peralatan Komputer TA 2021 sebesar Rp793.898.800,00 atau 96,44% Dari anggaran yang ditentukan sebesar Rp823.186.588,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2021 serta TA 2021 adalah sebagai berikut

<i>Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tempat Kerja</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Gedung Bangunan Tempat Kerja	75.000.000,00	72.499.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	75.000.000,00	72.499.000,00
<i>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	75.000.000,00	72.449.000,00
Belanja Modal Bangunan	75.000.000,00	72.449.000,00
JUMLAH	75.000.000,00	72.499.000,00

Ralisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 Sebesar Rp72.449.000,00 atau mencapai 96,60% dari anggaran Rp75.000.000,00. Sedangkan pada TA 2020 tidak ada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tidak Terdapat Realsisasi Belanja Jalan ,Irigasi dan Jaringan pada TA.2021 maupun 2020 atau dapat dikatakan Nihil.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA. 2021 dan pada SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut :

<i>Belanja Modal Aset tetap Lainnya</i>	TA 2021	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal Aset Teteap Lainnya	241.352.500,00	222.490.000,00
<i>Belanja Modal Bahan Perpustakaan Cetak</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Belanja Modal Buku laporan	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	241.352.500,00	222.490.000,00
Belanja Modal Software	241.352.500,00	222.490.000,00
JUMLAH	241.352.500,00	222.490.000,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap lainnya pada TA 2021 adalah sebesar Rp222.490.000,00 atau 92,18% dari anggaran yang ditetpkan sebesar Rp241.352.500,00 sedangkan pada TA 2020 tidak terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

3.1.3 Neraca

a. Aset

Saldo Aset SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.059.950.182,00 jika dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.958.604.644,00 mengalami *Penurunan* sebesar Rp898.654.462,00.atau 12,91%. dengan penjelasan masing-masing akun sebagai berikut:

Uraian	2021 (dalam Rupiah)	2020 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			dalam Rupiah	%
ASET LANCAR	63.168.760,00	1.007.893,00	62.160.867,00	6.167,41
ASET TETAP	5.306.631.705,00	6.438.196.996	(941.565.291,00)	(15,07)
ASET LAINNYA	690.149.717,0	529.399.755,00	160.794.962,00	30,37
Jumlah	5.977.873.644,00	6.958.604.644,00	(960.730.722,00)	(13,18)

1. Aset L

1. Aset Lancar

Saldo Aset Lancar SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp63.168.760,00 jika dibandingkan dengan saldo TA 2020 sebesar Rp1.007.893,00 maka mengalami *kenaikan* sebesar 6.167,41%. Dengan penjelasan sebagai berikut :

<u>Aset Lancar TA 2021 dan TA 2020</u>				
Uraian	TA 2021 (Rp.)	TA 2020 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi Jasa Umum	297.229.550,00	0,00	297.229.550,00	100,00
Penyisihan Piutang Pendapatan	(235.153.290,00)	0,00	(235.153.290,00)	100,00
Persediaan	1.092.500,00	1.007.893,00	84.607,00	08,39
JUMLAH	63.168.760,00	1.007.893,00	63.168.760,00	6.167,41

a. A

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tidak Terdapat Saldo Kas Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2021 atau bisa dikatakan Nihil

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Tidak Terdapat Saldo Kas Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 atau bisa dikatakan Nihil

c. Piutang Retribusi Jasa Umum

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan saldo Piutang Retrubusi Jasa Umum Per 31 Desember 2021 sebesar Rp297.229.550,00,- dibanding saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00,- Mengalami kenaikan sebesar Rp297.229.550,00,- atau sebesar 100,00%.

d. Piutang Penyisih Piutang Pendapatan

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan saldo penyisihan piutang pendapatan 31 Desember 2021 sebesar (Rp235.153.290,00,-) dibanding saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00,- Mengalami kenaikan sebesar Rp297.229.550,00,- atau sebesar 100,00%.

e. Persediaan

Neraca Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 menunjukkan saldo Persediaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.092.500.000,- dibanding saldo Per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.007.893.000,- Mengalami kenaikan sebesar Rp80.607,00 atau sebesar 08,39% dengan penjelasan sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 1.007.893,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Pengakuan atas saldo persediaan akhir hasil stok opname	:	1.092.500,00 1.092.500,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Pemakaian persediaan tahun lalu	:	1.007.893,00 1.007.893,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021		1.092.500,00

2. Aset Tetap

Kebijakan Akuntansi yang terkait dengan aset tetap telah dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 Tahun 2016 tentang kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 77 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Wonosobo maka dengan ini dilakukan penyesuaian dengan metode koreksi reklasifikasi antara akun lama berdasarkan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Akuntansi Pemerintah Berdasarkan Akrual Pada Pemerintah Daerah kea kun yang baru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016.

Pada Tabel III.15 di atas menunjukkan Saldo Aset Tetap Dinas Komunika dan Informatika sampai dengan 31 Desember 2021 setelah koreksi adalah sebesar Rp5.306.631.705,00 merupakan aset tetap yang dikelola oleh Kelurahan Kramatan dengan saldo akhir Tahun 2020 sebesar Rp6.438

.196.996,00 mengalami Penurunan sebesar Rp941.565.291,00 atau 15,07% dari Tahun 2020. Dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel III.16 Aset Tetap TA 2021 dan TA 2020

Uraian	2021 (dalam Rupiah)	2020 (dalam Rupiah)	Bertambah/(Berkurang)	
			Rp	%
Aset Tetap	5.306.631.705,00	6.428.196.996,00	(1.121.565.291)	(17,45)
Tanah	134.400.000,00	385.000.000,00	250.600.000,00	186,46
Peralatan dan Mesin	6.788.324.209,00	5.944.136.981,00	(844.187.228,00)	(12,44)
Gedung dan Bangunan	3.553.176.950,00	3.983.849.750,00	(450.672.800,00)	(11,31)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.600.000,00	17.600.000,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.034.368.130,00)	(3.672.748.165,00)	(1.361.619.965)	37,07
Akumulasi Penyusutan Jaln,Jaringan dan Irigasi	(7.113.333,00)	(6.233.333,00)	880.000,00	14,12
Aset Lainnya	690.149.717,00	529.399.755,00	(160.749.962,00)	(23,29)
Aset Tidak Berwujud	742.816.260,00	520.326.260,00	(222.490.000,00)	(29,95)
Aset Lain- Lain	74.990.596,00	81.639.758,00	6.649.192,00	08,87
AkumulasiAset tidak berwujud	(127,657,139,00)	(72.566.263,00)	55.090.876,00	(443,16)
JUMLAH				

a. Tanah

Tabel III.16 menunjukkan bahwa Saldo Aset Tetap Tanah yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp134.400.000,00 dan Rp385.000.000,00 dikarenakan adanya penambahan asset tanah dari Mutasi Serah Terima Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Jln. Sabuk Alu/Diskominfo, KPU) ke Dinas Komunikasi dan Informatika. Rincian Tanah dapat dilihat pada Tabel III.17 dibawah ini:

Tabel III.17 Tanah TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
Tanah	385.000.000,00	-	-	134.400.000,00	385.000.000,00	134.400.000,00
Tanah Persil	385.000.000,00	-	-	134.400.000,00	385.000.000,00	134.400.000,00

Tanah Bangunan perumahan/Gedung Tempat Tinggal	81.052.630,00	-	-	-	81.052.630,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Temoat Kerja	303.947.370,00			134.400.000,00	303.947.370,00	134.400.000,00
Jumlah	385.000.000,00	-	-	134.400.000,00	385.000.000,00	134.400.000,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 385.000.000,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Mutasi Serah Terima Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Jln. Sabuk Alu/Diskominfo, KPU) ke Dinas Komunikasi dan Informatika	:	134.400.000,00 134.400.000,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari - Serah Terima Aset Tetap ke BPPKAD (Jaraksari / Kantor PDIP-Jl. A.Yani 8 - Serah Terima Aset Tetap ke BPPKAD (Jl. A.Yani 8 Jaraksari / Pengadilan-Eks Disdagkop/Diskominfo)	:	385.000.000,00 81,052.630,00 303.947.370,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2020		133.400.000,00

b. Peralatan dan Mesin

Tabel III.16 menunjukkan bahwa Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Kelurahan Kramatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.788.324.209,00 dan 2020 adalah sebesar Rp5.944.136.981,00 mengalami penurunan sebesar Rp844.187.228,00 atau 14,02% dikarenakan karena terdapat adanya Mutasi/Koreksi selama TA 2020 dan adanya perubahan reklasifikasi Kode Rekening dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 ke Peraturan Menteri Dalam Negeri No 108 sehingga mengakibatkan adanya perubahan kode rekening pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel III.18 Peralatan dan Mesin TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
PERALATAN DAN MESIN						
<i>Alat Besar</i>	231.362.800,00	2.640.000,00	-	-	-	234.002.800,00
Alat Bantu	231.362.800,00	2.640.000,00	-	-	-	234.002.800,00
Alat Angkutan	676.498.160,00	-	-	-	-	676.498.160,00

Alat Kantor dan Rumah Tangga	811.830.480,00	66.794.9900,00	54.587.600,00	220.368.250,00	-	1.044.136.030,00
Alat Kantor	203.641.807,00	65.144.900,00	21.421.000,00	37.646.000,00	-	285.011.707,00
Alat Rumah Tangga	520.790.365,00	1.650.000,00	33.436.600,00	182.722.250,00	-	671.726.015,00
Meja dan Kursi/Rapat Pejabat	87.398.308,00	-	-	-	-	87.398.308,00
Alat Studio,Komunikasi dan Pemancar	906.255.432,00	28.105.000,00	29.249.000,00	29.249.000,00	-	934.360.432,00
Alat Studio	533.506.250,00	28.105.000,00	29.249.000,00	29.249.000,00	-	561.611.250,00
Alat Komunikasi	161.985.202,00	-	-	-	-	161.985.202,00
Alat Pemancar	210.763.980,00	-	-	-	-	210.763.980,00
Alat Laboratorium	57.105.977,00	-	-	-	-	57.105.977,00
Alat Laboratorium Fisika,Nulkir/elektronika	57.105.977,00	-	-	-	-	57.105.977,00
Komputer	3.305.790.109,00	321.374.000,00	784.491.499,00	986.148.200,00	-	3.829.820.810,00
Komputer Unit	551.226.384,00	321.374.000,00	192.249.400,00	192.249.400,00	-	872.600.384,00
Peralatan Komputer	2.754.563.725,00	-	591.242.099,00	793.898.800,00	-	2.957.220.426,00
Jumlah	5.944.136.981,00	479.019.877,00	867.598.099,00	1.235.765.450,00	-	6.788.324.209,00

Berdasarkan uraian table di atas Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 berdasarkan hasil dari Korekso adalah sebesar Rp6.788.324.209,00 sedangkan pada saldo per 31 Desember 2020 Saldo Awal Setelah Koreksi Kebijakan adalah sebesar Rp5.944.136.981,00. Hal ini disebabkan karna adanya Koreksi/Mutasi Debet dan Kredit pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 5.944.136.981,00.
(2)	Koreksi Bertambah (Debet) dari	:	479.019.877,00
	a) Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung kantor ke Alat Bntu - Pompa	:	2.640.000,00
	b) Reklasifikasi Belanja Modal Mabel dan Komputer Unit Lainnya Ke Alat Kantor - Alat Kantor Lainnya	:	65.144.900,00
	c) Reklasifikasi dai Belanja Modal Gedung Kantor ke Alat Alat Rumah Tangga Alt Dapur	:	1.650.000,00
	d) Reklasifikasi dari Belanja Modal Alat Studio Lainnya Ke Peralatan Alat Studio Komunikasi,pemancar - Studio	:	28.105.000,00
	e) Reklasifikasi dari Belanja Modal Jaringan Ke Alat laboratorium – System Power Suplay	:	57.105.977,00
	f) Reklasifikasi dari Belanja Modal Komputer Jaringan ke Personal komputer	:	127.704.000,00
	g) Reklasifikasi Belanja Modal Peralatan Mainframe ke Komputer Jaringan ke Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	:	193.670.000,00
(3)	Koreksii berkurang (Kredit) dari	:	867.598.099,00
	a) Reklasifikasi Belanja Modal Alat Kantor dan rRumah Tangga – Alat Kantor Lainnya ke Beban pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor	:	21.421.000,00
	b) Reklasifikasi dari BM Mebel ke Beban Pemeliharaan Personal Computer dan Beban Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya ke Alat Rumah Tangga - Mabel	:	32.857.000,00

					579.600,00
	c)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Alat Rumah Tangga – Lainnya (Home Use) Lainnya ke Beban Persediaan Alat Listrik			
	d)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Alat Studio Lainnya ke Peralatan Studio Video dan Film, dan Peralatan Studio Audio		28.105.000,00	
	e)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Alat Studio Lainnya ke Beban Persediaan Bahan Komputer		1.144.000,00	
	f)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Komputer Jaringan ke Personal Computer		127.704.000,00	
	g)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Komputer Jaringan ke Personal Computer		65.545.400,00	
	h)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan Mainframe ke Komputer Jaringan		193.670.000,00	
	i)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan Jaringan ke Beban Persediaan Bahan Komputer		340.466.122,00	
	j)	Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan Jaringan ke Beban Persediaan Bahan Komputer		57.105.977,00	
(4)		Mutasi Bertambah (Debet) dari		1.235.765.450,00	
	a)	Belanja Modal Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Tahun 2021		16.225.000,00	
	b)	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya Tahun 2021		21.421.000,00	
	c)	Belanja Modal Pengadaan Mebel Tahun 2021		122.615.900,00	
	d)	Belanja Modal Pengadaan alat Rumah Tangga Lainnya Tahun 2021		53.726.350,00	
	e)	Belanja Modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Tahun 2021		6.380.000,00	
	f)	Belanja Modal Pengadaan Alat Studio Lainnya Tahun 2021		29.249.000,00	
	g)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Jaringan Tahun 2021		127.704.000,00	
	h)	Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit Lainnya Tahun 2021		64.545.400,00	
	i)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Mainframe Tahun 2021		193.670.000,00	
	j)	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Tahun 2021		600.228.800,00	
		Saldo Per 31 Desember 2021 (1) + (2) – (3) + (4)		6.788.324.209,00	

c. Gedung dan Bangunan

Tabel III.19 menunjukkan bahwa Saldo Neraca Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp3.533.176.950,00 dan Rp3.983.849.750,00, mengalami kenaikan dikarenakan adanya koreksi maupun mutasi aset Gedung dan Bangunan sepenuhnya berupa Bangunan Gedung Tempat Kerja. Penjelasan Mutasi dan koreksi dapat dilihat pada tabel III.19 berikut:

Tabel III. 19 Gedung dan Bangunan TA 2021 dan TA 2020

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
GEDUNG DAN BANGUNAN						
<i>Bangunan Gedung Tempat Kerja</i>	<i>3.983.849.750,00</i>	<i>68.159.000,00</i>	<i>72.449.000,00</i>	<i>72.449.000,00</i>	<i>498.831.8000,00</i>	<i>3.533.176.950,00</i>

Bangunan Gedung Kantor	3.983.849.750,00	-	72.449.000,00	72.449.000,00	473.916.800,00	3.485017.950,00
Bangunan Gedung Garasi/Pool	24.915.000,00	-	--		24.915.000,00	-
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	68.159.000,00	-	-	-	68.159.000,00
Jumlah	3.983.849.750,00	68.159.000,00	72.449.000,00	72.449.000,00	498.831.800,00	3.533.176.950,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 3.533.176.950,00
(2)	Koreksi Bertambah (Debet) dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	:	68.159.000,00 68.159.000,00
(3)	Koreksi Berkurang (Kredit) dari Reklasifikasi dari Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya, Alat Dapur, dan Pompa	:	72.449.000,00 72.449.000,00
(4)	Mutasi Bertambah (debet) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	:	72.449.000,00 72.449.000,00
(5)	Mutasi Berkurang (Kredit) Serah Terima Aset Tetap ke BPPKAD (Jl. A Yani-Eks. Kantor Koperasi dan Usaha Micro, Kecil dan Menengah)	:	498.831.800,00 498.831.800,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2020		3.983.849.750,00

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada table Tabel III.16 Aset Tetap TA 2021 dan TA 2020 Aset Jalan,Irigasi,dan Jaringan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan nilai yang sama yaitu 17.600.000,00 yang berarti tidak adanya mutasi/koreksi debet maupun kredit pada TA 202.

e. Akumulasi Penyusutan

Pada table di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Akumulasi Penyusutan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar (Rp5.186.869.454,00), Jika dibandingkan dengan saldo TA 2020 sebesar (Rp3.902.389.735,00) mengalami kenaikan sebesar (1.284.479.719,00) atau 32,09%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

Tabel Akumulasi Penyusutan TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
AKUMULASI PENYUSUTAN						
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.672.748.165,00)	1,00	1.361.619.966,00	-	-	(5.034.368.130,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(118.097.900,00)	-	29.406.114,00	-	-	(147.504.104,00)
Akumulasi penyusutan Alat Angkutan	(615.381.367)	-	14.502.636,00			(629.884.003,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Ukur Lain-Lain	(8.220.000,00)	-	(2.480.000,00)	-		(10.700.000,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah tangga	(419.011.545,00)	-	145.668.587,00	-	-	(564.680.132,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(223.408.237,00)	-	70.160.501,00	-	(148.180.747,00)	(145.387.991,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(223.408.237,00)	-	70.160.501,00	-	(148.180.747,00)	(145.387.991,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio ,Komunikasi dan Pemancar	(461.354.895,00)	1,00	138.828.473,00	-	-	(600.183.367,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	317.255,00	-	-	(317.255,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(2.050.682.458,00)	-	1.030.416.9901,00	-	-	(3.081.099.359,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(6,233,333.00)	-	880.000,00	-	-	(7.133.333,00)
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(6.233.333,00)	-	880.000,00	-	-	(7.133.333,00)
Jumlah	(3.902.389.735,00)	1,00	1.361.620.876,00	-	(148.180.747,00)	(5.186.869.454,00)

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2019	:	Dalam Rupiah -3.902.389.735,00
(2)	Mutasi/Koreksi Bertambah (Debet) dari Koreksi kurang catat nilai akumulasi penyusutan	:	1,00 1,00
(3)	Mutasi/Koreksi Berkurang (Kredit) dari Beban penyusutan	:	1.213.440.129,00 1.213.440.129,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2020		-5.186.869.454,00

f. Aset Lainnya

Pada table dibawah ini menunjukkan bahwa saldo Aset Lainnya Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 adalah sebesar Rp,690.149.717,00 sedangkan TA 2020 Rp529.399.755,00 Saldo Aset lainnya tersebut berasal dari Saldo Aset Lain-Lain dan Akumulasi Aset lain lain. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel . Aset Lainnya TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2020 (Rp.)	TA 2021 (Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Aset Tidak Berwujud	520.326.260,00	742.816.260,00	222.490.000,00	42,76
Aset Lain- Lain	81.636.758,00	74.990.596 ,00	74.987.596,00	91.86
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(72.566.263,00)	(127.657.139,00)	-550.908.706,00	75.92
JUMLAH	529.399.755,00	690.149.717 ,00	160.749.962,00	30,36

Kemudian Paada table di bawah ini menunjukkan bahwa Saldo Neraca Ta 2021 Aset Tidak Berwujud yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar Rp690,149.717, Jika dibandingkan dengan saldo TA 2020 sebesar Rp529.399.755,00 mengalami kenaikan sebesar 222.490.000,00 atau 30.36%. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dan koreksi saldo selama TA 2021 dengan penjelasan dibawah ini.

Tabel Aset Tidak Berwujud TA 2020 dan TA 2019

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2021 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
ASET LAINYA						
Aset Tidak Berwujud	520.326.260,00	-	-	222.490.000,00	-	742.816.260,00

Aset Tidak Berwujud	520.326.260,00	-	-	222.490.000,00	-	742.816.260,00
Aset Lain- Lain	81.639.758,00	-	6.649.162,00	-	-	74.990.596,00
Aset Lain-Lain	706.101.606,00	-	-	-	-	706.101.606,00
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(624.461.848,00)	-	6.649.162,00	-	-	(631.111.010,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(72,566,263,00)	-	55.090.876,00	-	-	(127.657.139,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(72,566,263,00)	-	55.090.876,00	-	-	(127.657.139,00)
Jumlah	529.399.755,00	-	61.740.038,00	222.490.000,00	-	690.149.717,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2019	:	Dalam Rupiah 529.399.755,00
(2)	Koreksi Debet (Bertambah) Tidak terdapat koreksi debit pada Aset lainnya	:	0,00 0,00
(3)	Koreksi Kredit (Berkurang) Koreksi Kurang Catat nilai Akumulasi Penyusutan Beban Amortisasi Software TA 2021	:	61.740.038,00,00 6.649.162,00 55.090.876,00
(4)	Mutasi Debet (Bertambah) Belanja Modal pengadaan Software	:	222.490.000,00 222.490.000,00
(5)	Mutasi Kredit (Berkurang) Tidak Terdapat Mutasi kredit Aset lainnya	:	0,00 0,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2021		690.149.717,00

b. Kewajiban

Saldo Kewajiban Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 adalah sebesar Rp8.782.919,00. Jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2020 sebesar Rp2.114.420,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.668.499,00 atau 315.38%. Kewajiban Dinas Komunikasi sepenuhnya berasal dari Utang Belanja , dengan rincian sebagaimana Tabel dibawah ini:

Tabel Kewajiban TA 2021 dan TA 2020

Uraian	TA 2021 (Rp.)	TA 2020(Rp.)	Bertambah/(Berkurang)	
			(Rp.)	%
Utang Belanja pegawai	-	-	-	-
Utang Belanja Barang dan jasa	8.782.919,00	2.114.420,00	6.668.449,00	315.38
JUMLAH	8.782.919,00	2.114.420,00	6.668.449,00	315.38

....;

Pada Tabel diatas menunjukkan posisi saldo Utang Belanja yang terdiri dari utang belanja pegawai dan utang belanja barang dan jasa kenaikan yang terjadi pada pos utang belanja barang dan jasa terjadi akibat adanya koreksi dan mutasi kredit maupun debit yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Uraian	Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)	Koreksi		Mutasi		Saldo TA 2020 (dalam Rupiah)
		D	K	D	K	
KEWAJIBAN						
Utang Belanja	2.114.420,00	2.444.310,00	9.112.809,00	-	-	8.782.919,00
Utang Belanja Pegawai	-	329.890,00	285.600,00	-	-	-
Utang Belanja Barang dan Jasa	2.114.420,00	2.114.420,00	8,782.919,00	-	-	8.782.919,00
Jumlah	2.114.420,00	2.444.310,00	8,782.919,00	-	-	8.782.919,00

Penjelasan lebih lanjut mengenai mutasi dan koreksi masing-masing akun adalah sebagai berikut:

(1)	Saldo Per 31 Desember 2020	:	Dalam Rupiah 2.114.320,00
(2)	Koreksi Bertambah (Debet) dari	:	-
	Koresksi Atas pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	:	329.890,00
	Koreksi atas Pembayaran Utang Taguhan Telephone Tahun 2020	:	45.845,00
	Koreksi atas Pembayaran Utang Taguhan Air Tahun 2020	:	89.475,00
	Koreksi atas Pembayaran Utang Taguhan Listrik Tahun 2020	:	1.979.100,00
(3)	Koreksi Berkurang (Kredit) dari	:	8.782.919,00
	Koresksi Atas pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	:	329.890,00
	Koresksi Atas Pengakuan Utang Belanja Pegawai Tahun 2020	:	69.979,00
	Koreksi atas Pengakuan Utang Taguhan Telephone Tahun 2020	:	208.270,00
	Koreksi atas Pengakuan Utang Taguhan Air Tahun 2020	:	8.504.670,00
(4)	Mutasi Debet/Kredit	:	
	Tidak Terdapat Mutasi Debet Maupun Kredit pada Kewajiban TA 2021	:	0,00
(4)= (1)+(2)-(3)	Saldo Per 31 Desember 2020		8.782.919,00

a. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.051.167.263,00 dibandingkan dengan saldo ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp6.956.490.224,00 sehingga mengalami penurunan sebesar Rp905.322.291,00 atau (13,01)% Hal ini di sebabkan karena adanya Koreksi dan Mutasi Debet dan Kredit yang terjadi pada Tahun 2021

3.1. Laporan Operasional (LO)

3.3.1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan – LO di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 adalah sebesar Rp545.547.520,00 jika dibandingkan realisasi TA 2020 sebesar Rp335.788.480,00 mengalami kenaikan sebesar sebesar Rp210.759.040,00 atau 62,95%. Pendapatan LO di Dinas Komunikasi dan Informatika berupa Pendapatan Asli Daerah-LO. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada table III.23

Tabel III.23 Pendapatan-LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
	2021	2020	(Rp)	(%)
PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH -LO				
Retribusi Daerah-LO				
Retribusi Jasa Umum-LO	455.797.230,00	305.188.480,00	150.608.750,00	49,35
Retribusi Jasa Usaha-LO	89.750.290,00	30.600.000,00	59.150.290,00	193,30
Jumlah	545.547.520,00	335.788.480,00	210.759.040,00	62.95

a. Retribusi Jasa Umum-LO

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum-LO di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 sebesar Rp455.797.230,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp305.188.480,00 mengalami kenaikan 49,35%.

b. Retribusi Jasa Usaha-LO

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Usaha-LO di Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 sebesar Rp89.750.290,00 Jika dibandingkan dengan Realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp30.600.000,00 mengalami kenaikan 193,30%.

3.3.2. Beban-LO

Realisasi Beban Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 adalah sebesar Rp7.343.895.248,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2010 sebesar Rp6.081.001.495,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.262.893.753,00 atau 21.13%. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel III.24 sebagai berikut.

Tabel III.24 Beban-LO

NO	Uraian	Relisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	(Rp)	(%)
1	Beban Pegawai	2.560.242.620,00	2.258.534.745,00	301.707.875,00	13,36
2	Beban Persediaan	694.579.282,00	629.434.382,00	39.458.933,00	06,27
3	Beban Jasa	2.335.215.712,00	1.549.674.659,00	785.541.053,00	50,69
4	Beban Pemeliharaan	147.044.650,00	9.600.000,00	137.444.650,00	1.431,72
5	Beban Perjalanan Dinas	119.061.643,00	114.305.779,00	4.755.864,00	04,16
6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beban Penyusutan dan Amortasi	1.487.751.341,00	1.479.102.780,00	8.648.561,00	0,58

9	Beban Lain- Lain	0,00	890.217,00	(890.217,00)	(100,00)
	Jumlah	7.343,895.248,00	6.081.001.495,00	1.276.666.719,00	21,13

1. Beban Pegawai

Pada table dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Pegawai TA 2021 sebesar Rp2.560.242.620,00 Jika dibandingkan dengan relisasi TA 2020 sebesar Rp2.258.534.745,00 mengalami kenaikan sebesar Rp301.707.875 atau 13.36%.

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	(Rp)	(%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan	1.489.545.915,00	1.408.230.120,00	81.315.795,00	05,77
2	Beban Tambahan Penghasiln ASN	1.070.696.705,00	787.004.625,00	283.692.080,00	36.05
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	63.300.000,00	(63.300.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.560.242.620,00	2.258.534.745,00	301.707.875,0	13.36

a. Beban Gaji dan Tunjangan

Pada table diatas menunjukkan bahwa Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan - LO TA 2021 adalah sebesar Rp1.489.545.915,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.408.230.120,00 mengalami kenaikan Rp81.315.795,00 atau 05,77%.

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Pada table di bawah ini menunjukkan bahwa Relaisasi beban Honorarium PNS TA 2021 adalah sebesar Rp1.070.696.705,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2019 adalah Rp787.004.625,00 maka mengalami kenaikan sebesar Rp283.692.0080,00 atau 36,05%.

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarakan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Pada table di atas menunjukkan bahwa Relaisasi beban Tambahan Pengasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN TA 2021 Rp.0,00 dan setelah adanya Koreksi Beban mejadi Rp63.300.000,00

2. Beban Persediaan

Pada table dibawah ini menunjukkan Realisasi Beban Persediaan TA 2021 adalah sebesar Rp629.434.382,00 Jika dibandingkan dengan relisasi TA 2010 sebesar Rp668.893.315,00 mengalami penurunan sebesar Rp39.458.933,00 atau 05,90%.

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	(Rp)	(%)
1	Beban Bahan Pakai Habis	694.096.282,00	668.893.315,00	(39.941.993,00)	(05,97)
2	Beban Barang Tak Pakai Habis	483.0000,00	0,00	483.000,00	100,00
	Jumlah	694.434.382,00	668.893.315,00	(39.458.933,00)	(05,90)

a. Beban Bahan Pakai Habis

Pada table diatas menunjukkan bahwa Realisasi Beban Bahan Pakai Habis - LO TA 2021 adalah sebesar Rp694.096.280,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp668.893.315,00 mengalami penurunan Rp39.458.933,00 atau 05,97%.

b. Beban Bahan Tak Pakai Habis

Pada table diatas menunjukkan bahwa Realisasi Beban Bahan Pakai Habis - LO TA 2021 adalah sebesar Rp483.000,00 Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2020 bisa dikatakan mengalami penurunan 100%.

3. Beban Jasa-LO

Beban Jasa-LO TA 2021 adalah sebesar Rp2.335.215.712,00 jika di bandingkan dengan Beban Jasa LO TA 2020 adalah Rp.1.549.674.659,00 mengalami kenaikan sebesar Rp785.541.053,00 atau 44,24% dengan rincian sebagaimana Tabel III.30 sebagai berikut:

Tabel III.30 Beban Jasa-LO

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	Rp.	%
	BEBAN JASA-LO				
	Beban Jasa	2.335.215.712,00	1.470.435.659,00	764.780.053,00	52,01
1	Beban Jasa Kantor	2.028.379.602,00	1.450.071.019,00	578.308.583,00	39,88
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	18.551.110,00	1.784.640,00	16.766.470,00	934,49

3	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	0,00	7.200.000,00	(7.200.000,00)	(100,00)
4	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	3.600.000,00	1.500.000,00	2.100.000,00	140,00
5	Beban Jasa Konsultasi non Konstruksi	268.785.00,00	0,00	268.785.000,00	100,00
6	Beban Kursus/Pelatihan,Sosialisasi,Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	15.900.000,00	9.880.000,00	6.020.000,00	60,93
	Beban Uang dan/Atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	72.239.000,00	(72.239.000,00)	(100,00)
1	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	72.239.000,0	(72.239.000,00)	(100,00)
	Jumlah	2.335.215.712,00	1.549.674.659,00	685.541.053,00	44,24

a. Beban Jasa Kantor

Realisasi Beban Jasa Kantor TA 2021 adalah sebesar Rp2.028.379.602,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp1.450/071.019,00 maka bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar Rp578.308.583,00 atau 39,88%.

b. Beban Iuran Jaminan/Asuransi

Realisasi Beban Iuran Jaminan/Asuransi TA 2021 adalah sebesar Rp18.551.110,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp1.784.640,00 maka bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp16.766.470,00 atau 943,49%.

c. Beban Sewa Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban sewa Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah Nihil bila di bandingkan dengan TA 2020 adalah Rp7.200.000,00 maka dapat dikatakan mengalami penuruanan sebesar Rp7.200.000,00 atau 100 %

d. Beban Sewa Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Sewa Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp3.600.000,00 sedangkan TA 2020 adalah sebesar Rp1.500.000,00 atau dapat dikatakan mengalami kenaikan Rp2.100.000,00 atau 140%

e. Beban Kursus Pelatihan ,Sosialisasi ,Bimbingan Teknis serta pendidikan dan Pelatihan

Realisasi jasa Pelatihan ,Sosialisasi ,Bimbingan Teknis serta pendidikan dan Pelatihan TA 2021 adalah sebesar Rp 15.900.000,00 sedangkan TA 2020 adalah Nihil atau dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 100%.

f. Beban Jasa Konsultasi Non Konstruksi

Realisasi jasa Konsultasi Non Konstruksi TA 2021 adalah sebesar Rp 268.785.00,00 sedangkan TA 2020 adalah sebesar Rp9.880.000,00 atau dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar 60,93%.

- g. Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Realisasi jasa Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2021 adalah Rp0,00 sedangkan TA 2020 adalah sebesar 72.239.000,00 atau dapat dikatakan mengalami penurunan sebesar 100%.

4. Beban Pemeliharaan – LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika sepenuhnya berasal dari Realisasi Beban pemeliharaan . Realisasi Beban Pemeliharaan TA 2021 adalah Rp147.044.650,00 apabila di bandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp9.600.000,00 dapat dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp137.444.650,00 atau 1.431,72%

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	Rp.	%
	BEBAN PEMELIHARAAN – LO	147.044.650,00	9.600.000,00	13.444.650,00	1.431,72
	Beban Pemeliharaan	147.044.650,00	9.600.000,00	13.444.650,00	1.431,72
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.241.150,00	0,00	102.241.150,00	100,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	44.803.500,00	9.600.000,00	35.203.500,00	366,70
	Jumlah	147.044.650,00	9.600.000,00	13.444.650,00	1.431,72

a. Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Realisasi Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin TA 2021 adalah sebesar Rp102.241.150,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp0,00 atau Nihil maka bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar Rp102.241.150,00 atau 100%.

b. Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Realisasi Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan TA 2021 adalah sebesar Rp44.803.500,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp9.600.000,00 maka bisa dikatakan mengalami peningkatan sebesar Rp35.203.500,00 atau 366,70%.

5. Beban Perjalanan Dinas-LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO Dinas Komunikasi dan Informatika sepenuhnya berasal dari Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Realisasi Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TA 2021 adalah sebesar Rp119.061.643,00, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp114.305.779,00

maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp4.755.864,00 atau 04,16%.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas Komunikasi dan Informatika. realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-Lo TA 2021 sebesar Rp1.487.751.341,00 sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.479.102.780,00 Untuk Lebih Jelasnya, Uraian tersebut dapat di lihat secara rinci pada Tabel Berikut :

NO	Uraian	Realisasi		Kenaikan/(Penurunan) Realisasi	
		2021	2020	Rp.	%
	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	1.487.751.341,00	1.479.102.780,00	8.648.561,00	00,58
	<i>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</i>	<i>1.361.619.964,00</i>	<i>1.365.377.789,00</i>	<i>(3.757.825,00)</i>	<i>(0,28)</i>
1	Beban Penyusutan Alat Besar	29.406.114,00	32.737.543,00	(3.331.429,00)	(10,18)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	14.502.636,00	69.147.754,00	(56.645.118,00)	(70,030)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	145.668.585,00	125.745.110,00	19.923.475,00	15,84
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	138.828.473,00	125.955.211,00	12.873.262,00	10,22
7	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	317.255,00	0,00	(317,255,00)	(100,00)
8	Beban Penyusutan Komputer	1.030.416.901,00	1.008.312.171,00	22.104.730,00	02,19
	<i>Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan</i>	<i>70.160.501,00</i>	<i>79.783.319,00</i>	<i>(9.622.818,00)</i>	<i>(12,06)</i>
9	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempa Kerja	70.160.501,00	79.783.319,00	(9.622.818,00)	(12,06)
	<i>Beban Penyusutan Jaln Jaringan dan Irigasi</i>	<i>880.000,00</i>	<i>880.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
10	Beban Penyusutan Instalasi	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00
	<i>Beban Amortisasi Aset tdk Berwujud</i>	<i>55.090.876,00</i>	<i>33.046.672,00</i>	<i>22.044.204,00</i>	<i>66,71</i>
11	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	55.090.876,00	33.046.672,00	22.044.204,00	66,71
	Jumlah	1.487.751.341,00	1.479.102.780,00	8.648.561,00	00,58

a. Beban Penyusutan Alat Besar

Realisasi Beban Penyusutan Alat Besar TA 2021 adalah sebesar Rp29.406.114,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp32.737.543,00,00 maka bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp3.331.429,00 atau 10,18%.

b. Beban Penyusutan Alat Angkutan

Realisasi Beban Penyusutan Alat Angkutan TA 2021 adalah sebesar Rp14.502.636,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp69.147.754,00 maka bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp3.331.429,00 atau 79,03%.

c. Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur

Realisasi Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur TA 2021 adalah sebesar Rp2.480.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp2.480.000,00 maka bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan

d. Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Realisasi Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga TA 2021 adalah sebesar Rp145.668.585,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp125.745.100,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp19.923.475,00 atau 15,84%.

e. Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar

Realisasi Beban Penyusutan Alat Studio Komunikasi dan Pemancar TA 2021 adalah sebesar Rp138.828.473,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar sebesar Rp125.955.211,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp12.873.262,00 atau 10,22%.

f. Beban Penyusutan Alat Laboratorium

Realisasi Beban Penyusutan Alat Laboratorium TA 2021 adalah sebesar Rp317.255,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp0,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp317.255,00 atau 100%.

g. Beban Penyusutan Komputer

Realisasi Beban Penyusutan komputer TA 2021 adalah sebesar Rp1.030.416.901,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp1.008.312.171,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp22.104.730,00 atau 02,19%.

h. Beban Penyusutan Gedung Bangunan Tempat Kerja

Realisasi Beban Penyusutan Gedung Bangunan Tempat kerja TA 2021 adalah sebesar Rp70.160.501,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp79.783.319,00 maka bisa dikatakan mengalami penurunan sebesar Rp9.622.818,00 atau 12,06%.

i. Beban Penyusutan Instalasi

Realisasi Beban Penyusutan instalasi kerja TA 2021 adalah sebesar Rp880.000,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp880.000,00 maka bisa dikatakan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan

j. **Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Realisasi Beban Penyusutan instalasi kerja TA 2021 adalah sebesar Rp55,090,876,00 apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 Rp33.046.672,00 maka bisa dikatakan mengalami kenaikan sebesar Rp22,044,204,00 atau 66,71%

7. Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain –lain -LO Dinas Komunikasi dan Informatika TA 2021 adalah sebesar Rp235.153.290,00, yang sepenuhnya berasal dari Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar Rp890.217,00, maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan 26.315,28% atau Rp.234.263.073,00.

3.3.3. Surplus/(Defisit) dari Operasi

Realisasi Pendapatan-LO TA 2021 sebagaimana penjelasan diatas maka diperoleh defisit operasi sebesar (Rp7.033.501.018,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar (Rp5.745.213.015,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.288.288.003,00 atau 22.42%.

3.3.4. Kegiatan Non Operasional

Pada TA 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat Kegiatan Non Operasional

3.3.5. Surplus/Defisit-LO

Berdasarkan surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/deficit luar biasa pada TA 2021 diatas maka diperoleh defisit-LO sebesar (Rp7.033.501.018,00), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 yaitu sebesar (Rp5.691.213.015,00) maka bisa dikatakan cenderung mengalami kenaikan sebesar Rp1.342.288.003,00 atau 23.59%.

3.2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas selama tahun 2021. Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.051.167.263,00 dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020

sebesar Rp6.956.490.224,00, ditambah surplus/defisit LO TA 2021 sebesar (Rp7.033.501.018) ditambah dampak kumulatif/kesalahan mendasar TA 2021 sebesar (Rp358.652.316), ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp6.486.830.373,00

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal TA 2020 sebesar Rp6.956.490.224,00 berasal dari Saldo Ekuitas Neraca per 31 Desember 2021 sebesar Rp6.059.950.182,00

2. Surplus/(Defisit) LO TA 2020

Berdasarkan Laporan Operasional TA 2021 menunjukkan bahwa defisit LO Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebesar (Rp7.033.501.018,00)

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Sementara itu pada TA 2021 terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp358.652.316,00) yang berasal dari:

- a) Koreksi Kurang Catat Piutang Rp249.577.790,00
- b) Koreksi Aset Tetap SKPD (Masuk) Rp134.400.000,00
- c) Koreksi Salah Catat Rp1,00
- d) Mutasi Antar SKPD (Keluar) Rp735.651.053,00
- e) Koreksi Kurang Catat Rp6.649.164,00
- f) Koreksi Kurang Catat Utang Rp329.890,00

4. Kewajiban yang di konsolidasikan sebesar Rp6.486.830.373,00

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

A. Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) Kabupaten Wonosobo lahir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Sebelum menjadi Dinas tersendiri, urusan komunikasi dan informatika ditangani oleh Dinas Perhubungan dengan nama Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika. Setelah terbit Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, urusan komunikasi dan informatika menjadi salah satu bagian dalam Sekretariat Daerah yaitu Bagian Komunikasi dan Telematika Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.

Seperti disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, Dinas Kominfo merupakan Dinas Type C menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik. Sebagai salah satu pilar Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo berkewajiban untuk mensukseskan Visi dan Misi Kabupaten Wonosobo sebagaimana termuat dalam RPJMD Tahun 2016 - 2021 yaitu **“TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA”**.

Harapan dari ini semua tidak lain adalah terciptanya layanan informasi kepada masyarakat secara luas, transparan dan akuntabel sebagai wujud dari pertanggung jawaban pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo kepada masyarakat

Dalam mengelola keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh para Pejabat Pengelola Keuangan, dengan susunan sebagai berikut:

Tabel IV.1
Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2021

No	Pengelola Keuangan	Nama	NIP	JABATAN
1	Pengguna Anggaran	Retno Eko Syafariati Hugraheni, S.Sos., MM	197303161992032004	Plt. Keala Dinas
2	PPK SKPD	Winarningsih, SH	196506041990032007	Sekretaris Dinas
3	Bendahar Pengeluaran	Usman Rifai	197712072014061001	Pelaksana
4	Bendahara Penerimaan	Agung Wibawanto, S.IP	196910262007011009	Pelaksana
5	Bendahara Pengurus Barang	Dwi Puji Haryono, S.IP	197304082009011003	Pelaksana
6	Bendahara Urusan Gaji	Suwarti	196701011989032018	Pelaksana

Sementara itu dalam menjalankan tugas pokok sehari-hari Dinas Komunikasi dan Informatika memberdayakan personil yang ada dengan data sebagai berikut.

Tabel IV.3
Data Karyawan Tahun Anggarn 2021

NO	Golongan	Jumlah
1	ASN Golongan IV	4 orang
2	ASN Golongan III	16 orang
3	ASN Golongan II	4 orang
4	Non ASN	32 orang
	Jumlah	56 orang

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan TA 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan informasi mengenai kemampuan merealisasikan pelaksanaan kegiatan berdasarkan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan ini menyajikan perbandingan antara anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan dengan realisasinya dalam TA 2021 serta realisasi TA sebelumnya, posisi kekayaan Dinas Komunikasi dan Informatika dan kegiatan operasional, perubahan saldo maupun perubahan ekuitas selama 1 periode akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Demikian laporan keuangan ini disusun dengan penjelasan yang memadai sebagai bahan konsolidasi penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo TA 2021.

Wonosobo, 23 Mei 2022

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WONOSOBO

FAHMI HIDAYAT. S.IP..M.P.P
Pembina
NIP. 197108251999031006